



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA PERUBAHAN)
KECAMATAN BONTOSIKUYU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kecamatan Bontosikuyu dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Kantor Camat Bontosikuyu

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian rencana kerja perubahan Kantor Camay Bontosikuyu merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan RKPD dan Renstra 2025-2029.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 kantor Camat Bontosikuyu sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW I, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Kecamatan Bontosikuyu tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten kepulauan Selayare.

Pariangan, April 2025
CAMAT BOTOSIKUYU,

Drs . MUHAMMAD ARIS.
Pangkat : Pembina Tk.I.IV/b
NIP : 196710291995121002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Kecamatan Bontosikuyu berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. I) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
3. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

Salah satu misi pembangunan Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar yang tercantum dalam RKPD yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif, yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui “Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur” yang menghasilkan ASN Kreatif, Inovatif, dan Kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan inovasi daerah. Sasaran dari misi tersebut adalah Meningkatnya birokrasi pemerintahan transparan dan kolaboratif. Pelaksanaan Misi I dengan Agenda Pembangunan yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Program Peningkatan Kualitas Birokrasi.

Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD OPD) setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKP) Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2025 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PerubahanPPAS).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bonytosikuyu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UNdang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Kantor Camat Bontosikuyu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Program dan Kegiatan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dan Rencana Strategis Perubahan kecamatan Bontosikuyu Tahun 2021-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target

kinerja program dan kegiatan

- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan yang lebih profesional
- f. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- g. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bontosikuyu Sampai dengan Triwulan II
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada **tabel 2.1**.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayan Kantor Camat Bontosikuyu
Memuat kompilasi pencapaian kinerja pelayan OPD Tahun berjalan sampai dengan Triwulan I
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontosikuyu
Memuat kompilasi penjabaran isu-isu penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, permasalahan dan peluang OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III RENCANA DAN PENDANAAN OPD

Memuat Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja, dan Rekapitulasi Perubahan Renja dan Pendanaan OPD **tabel 3.1**

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI KECAMATAN BONTOSIKUYU SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Kecamatan Bontosikusampai dengan Triwulan I

LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD KABUPATEN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025
KECAMATAN BONTOSIKUYU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025			
					6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan bontosikuyu			Nilai SAKIP Kecamatan Bontosikuyu (Angka)	80	6,386,198,598	70	1,664,820,684	75	2,100,236,500																			
				Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (Predikat)	sesuai		sesuai		sesuai																				
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bontosikuyu (Indeks)	85		75		80																				
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	6.340.027.048	0,00	1.649.820.684	71,51	2.094.786.100									0	0							Belum Tercapai		
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	95,00		0,00		91,00										0	0							Belum Tercapai		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu (%)	100,00	50.500.000	12,00	4.500.000	100,00	12.980.000	0,00%		0,00%						0,00%	0	12,00%	4.500.000	12,00%	8,91%	KECAMATAN BONTOSIKUYU				
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	10,500,000	1	1,500,000	3	6,618,600	0		0						0	0	1	1,500,000	20,00%	14,29%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Belum Tercapai			
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	10,000,000	1	1,500,000	1	1,618,600	0		0						0	0	1	1,500,000	20,00%	15,00%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Belum Tercapai			
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	10,000,000	0		1	1,562,100	0		0						0	0	0		0,00%	0,00%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Belum Tercapai			
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	10,000,000	1	1,500,000	1	1,618,600	0		0						0	0	1	1,500,000	20,00%	15,00%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Belum Tercapai			
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	10,000,000	0		1	1,562,100	0		0						0	0	0		0,00%	0,00%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Belum Tercapai			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100,00	4.142.694.750	16,01	1.354.057.423	100,00	1.555.129.900	0,00%		0,00%						0,00%	0	16,01%	1.354.057.423	16,01%	32,69%	KECAMATAN BONTOSIKUYU				
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	4,115,694,750	25	1,354,057,423	60	1,551,298,000	0		0						0	0	25	1,354,057,423	48,04%	32,90%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Belum Tercapai			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	24,000,000	0		0	2,553,600	0		0						0	0	0		0,00%	0,00%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Tercapai			

		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	3,000,000	0	0	1	1,278,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Belum Tercapai				
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Kantor (%)	100,00	545.500,000	17,78	83.235.200	100,00	198.130.000	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	17,78%	83.235.200	17,78%	15,26%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	50,000,000	0	0	0	76,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Tercapai			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	25,500,000	1	4,080,000	0	8,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,080,000	20,00%	16,00%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Tercapai
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	470,000,000	1	79,155,200	1,050	112,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	79,155,200	33,33%	16,84%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Belum Tercapai
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	1.369.332.298	33,33	159.762.561	100,00	220.938.200	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	33,33%	159.762.561	33,33%	11,67%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	49,332,298	1	8,033,671	1	18,140,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,033,671	33,33%	16,28%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Belum Tercapai
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	1,320,000,000	1	151,728,890	1	202,798,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	151,728,890	33,33%	11,49%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Belum Tercapai
No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2025		
					6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100,00	232.000,000	16,67	48.265.500	100,00	107.608.000	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	16,67%	48.265.500	16,67%	20,80%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	185,000,000	5	48,265,500	0	97,608,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	48,265,500	33,33%	26,09%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Tercapai
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	47,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Tercapai
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Menit)	8,00	46.171.550	0,00	15.000.000	10,00	5.450.400											0							Belum Tercapai
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	95,00	46.171.550	33,33	15.000.000	90,00	5.450.400	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	33,33%	15.000.000	37,04%	32,49%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	46,171,550	1	15,000,000	12	5,450,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15,000,000	33,33%	32,49%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Belum Tercapai
2	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa			Persentase peningkatan fungsi lembaga desa yang dikoordinasikan (%)	73	95.772,870	70	34.045,100	71	34.538,900																		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (%)	100,00	95.772.870	0,00	34.045.100	100,00	34.538.900											0							Belum Tercapai
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan (%)	95,00	80.772.870	83,33	34.045.100	90,00	14.538.900	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	83,33%	34.045.100	92,59%	42,15%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	49,772,870	4	12,835,100	4	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12,835,100	133,33%	25,79%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Belum Tercapai
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	31,000,000	1	21,210,000	4	2,538,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21,210,000	33,33%	68,42%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Belum Tercapai

		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan (%)	0,00	15.000.000	0,00	0	0,00	20.000.000	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	KECAMATAN BONTOSIKUYU		
		7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	300	15,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	KECAMATAN BONTOSIKUYU	Tercapai
3	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontosikuyu			Tingkat Toleransi di Kecamatan (%)	77	51,735,015	68	19,978,000	72	81,568,000																	

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan TW I (sd Maret 2025) sebagai berikut : Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun evaluasi sampai dengan TW I (per 31 Maret 2025) Tahun 2025 dari Program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

a. **Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 12.980.000- dan terealisasi sebesar Rp 0. atau 0 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Program perencanaan , penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 6.618.000,-- dan terealisasi sebesar Rp.0 atau 0 % dari alokasi anggaran
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 1.518.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0 atau 0 % dari alokasi anggaran
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 1.562.000,- dan terealisasi sebesar Rp. atau 0% dari alokasi anggaran
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Fokumen DPA dengam aloasi anggaran Rp. 1.616.600 dan terrealisai sebesar Rp.0 atau 0 % dari alokasi anggaran
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Fokumen DPA dengam aloasi anggaran Rp. 1.616.600 dan terrealisai sebesar Rp.0 atau 0 % dari alokasi anggaran
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Petrunahan DPA dengam aloasi anggaran Rp. 1.616.600 dan terrealisai sebesar Rp.0 atau 0 % dari alokasi anggaran

- b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** bertujuan untuk pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan alokasi anggaran Rp 1.551.900.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 247.340.680.- atau 15.45 % dari alokasi anggaran dengan Sub Kegoatan

Adapun rincian kegiatan dan program :

1. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.551.298.000 dan terealisasi sebesar Rp..247.340.680.-. atau sebesar 15.45%
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 2.553.600 dan Realisasi sebesar Rp.0 atau 0 % dari lokasi Anggaran
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.273.300 dan Realisasi sebesar Rp, 0 atau 0 % dari Lokasi Anggaran

- B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** bertujuan untuk peningkatan penyediaan peraturan perundang undangan dengan alokasi anggaran Rp. 198.130.000- dan terealisasi sebesar Rp. 18.600.000- atau 13.13 % dari Alokasi anggaran

Adapun rincian kegiatan dari program :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan .dengan output terpenuhinya bahan bacaan dengan alokasi Anggaran Rp 8.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp. ,-atau 0 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Output kegiatan terlaksana konsultasi dan kelancaran tugas tugas SKPD dengan alokasi anggaran Rp 112.875,000- dan terealisasi sebesar Rp 18.600.000,- atau 5, 56 % dari alokasi anggaran.
3. Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan kantor / Belanja Modal dengan alokasi anggran Rp. 76.975.000 dan terrealisasi Rp.0 atau 0 % dari Lokasi Anggaran.

C. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

bertujuan untuk terlaksananya urusan pemerintahan di kecamatan bontosikuyu dengan alokasi anggaran Rp. 220.938.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.500.000 - atau 13 % % dari Alokasi anggaran.

Adapun rincian kegiatan dari Program:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan output terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi air dan listrik dengan alokasi anggaran Rp 18.140.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0 ,- atau 0 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor dengan output terpenuhinya pelaksanaan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp 202.798.150 dan terealisasi sebesar Rp36.500.000 - atau 13 % dari alokasi anggaran.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah bertujuan terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 107.608.00,- dan terealisasi sebesar Rp 12.650.000 ,- atau 99,17 % dari alokasi anggaran.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan dengan output kegiatan tersedianya biaya pemeliharaan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 97.608.888,- dan terealisasi sebesar Rp 12.650.000 atau 08 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 10,000,000 dan terrealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 % dari Lokasi anggran

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMETINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Kegiatan Koordiansi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0 % dari alokasi anggaran.

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Output terlaksananya kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0 % dari alokasi anggaran.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.538.900 ,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000 atau 45 99 % dari alokasi anggaran.

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa alokasi anggaran sebesar Rp 12.000.000 ,-dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000 atau 100 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan alokasi anggaran sebesar Rp 2.538.000,-dan terealisasi sebesar Rp 0- atau 0 % dari alokasi anggaran.

4 . PROGRAM PENYELENGGRAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 81.568.000- dan terealisasi sebesar Rp 0- atau 0 % dari alokasi anggaran

Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp 81.568.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0 – atau 0 % dari alokasi anggaran.

5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERITAHAN DESA

. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemErintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.754.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0 atau 0 % dari alokasi anggaran.

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.754.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0 - atau 0 % dari alokasi anggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontosikuyu

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonosikuyu Tahun 2025
Sampai Triwulan I

No	Indikator Kinerja Utama	SPM	IKK	Target Kinerja Capaian Renstra	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan			100	99	Jumlah perangkat daerah yang mampu menerapkan digitalisasi pelayanan publicx 100 % Jumlah Perangkat Daerah
2.	Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan di Kecamatan			100	100	Jumlah Perangkat Daerah yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan public pada setiap urusan pemerintahanx 100 Jumlah Perangkat Daerah
3.	Indeks Keberhasilan Pembangunan			100	85.75	Jumlah Perencanaan yang dapat di Realisasikan
4.	Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis dan Pelayanan Publik	-		100	100	Jumlah perangkat daerah yang menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronikx 100 Jumlah Perangkat Daerah
5.	Persentase Perencanaan Pembangunan dala Musyawarah kecamatan	-		75	2,39	Jumlah usulan Pembangunan yang sesuai Kebutuhan Masyarakatx 100 Jumlah dataPerencanaan pembangunan sl
6.	Indeks Pembangunan dalam meingkatkan hasil Perencanaan	-		80	80	Penerapan sistem perencanaan berbaisi aplikasi
7.	Indek Reformasi Birokrasi	-		B	-	
8.	Nilai SAKIP			2,6	1,50	Hasil evaluasi SAKIP tahun 2023

9.	Laporan Keuangan Sesuap SAP	-		Tingkat I	Tingkat II	Hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan
10.	Indeks Kepuasan Masyarakat			72,50	78,1	Hasil penilaian survey kepuasan masyarakat terhadap layanan bidang komunikasi, informasika, statistic dan persandian Tahun 2023
11			Persentase Layanan Sistem Informasi Terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas	100	100	Jumlah Layanan Sistem Informasi Terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitasx 100 % Jumlah Layanan
12			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasix 100 Jumlah layanan publik
13			Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerahx 100 % Jumlah Perangkat daerah
14			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data perencanaan dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah	100	100	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerahx 100 % Jumlah Perangkat Daerah
15			Persentase Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

- Digitalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang didesentralisasikan ke Kabupaten dengan Indikator Persentase pemenuhan Kebutuhan Digitalisasi Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yaitu Perangkat daerah yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan public ditargetkan 50 % dengan capaian 100 %, Target Realisasi Tercapai karena semua perangkat daerah telah menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik sebagai salah satu bentuk digitalisasi pelayanan dari tanda tangan manual ke tanda tangan melalui aplikasi sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah.
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan Pemerintahan dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mampu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Setiap Urusan dengan target 50 %, terealisasi 100 % karena semua perangkat daerah telah menggunakan tanda tangan elektronik sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan public, Aplikasi SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat) di Dinas KominfoSP terkait layanan aduan online yang bisa diakses semua Masyarakat untuk kemudian oleh DiskominfoSP ditindaklanjuti ke Perangkat Daerah terkait, Aplikasi OSS (One Single Service) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Pelayanan Penerbitan Izin secara Online, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dikelola Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah terkait Pelayanan Pengadaan barang dan jasa secara online, aplikasi SIPATUO (Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait Pelayanan Informasi tentang perizinan, Peta Bencana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Sistem informasi Masyarakat untuk mengetahui sebaran daerah rawan bencana, Aplikasi Antrian Online di Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai bentuk pelayanan publik yang lebih mudah kepada Masyarakat, JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah aplikasi yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait data Regulasi, Kebijakan dan Peraturan

Perundang-Undangan, Aplikasi SILADUS (Sistem Informasi layanan pengaduan Masyarakat selayar), SIPANDA (Sistem Informasi Pelaporan dan Pengaduan Bencana Daerah).

- Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Indikator Indeks SPBE dengan target 2,6, Pada Tahun 2023 Indeks SPBE 1,93. Tidak tercapainya target sesuai yang diharapkan karena pada kebijakan internal terkait tata Kelola SPBE belum ditemukan proses review pada kebijakan tersebut, Perencanaan Strategis SPBE masih berada dalam kondisi lemah, Teknologi Informasi dan Komunikasi belum memberikan bukti dukung yang sesuai dengan indikator yang diukur, Penyelenggaraan SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Layanan Publik berbasis elektronik dan Audit TIK juga masih berada pada kondisi lemah, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik berada pada kondisi lemah mendekati standar, karena layanan sudah menggunakan system berbagi pakai namun indikator belum melampirkan bukti dukung yang cukup.
- Meningkatnya Tingkat kematangan Domain, Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE, dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target 50 % terealisasi 100 % karena semua perangkat daerah telah menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronik mulai dari penyusunan rencana kerja kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran melalui aplikasi SIPD, penginputan Realisasi anggaran, Evaluasi Renja dan Renstra di aplikasi MANCA.
- Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral dengan Indikator Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia dengan target 75 % dan terealisasi 21,39 %. Target tidak tercapai karena pada tahun 2023 hanya terdapat 46 Data statistic sektoral yang sesuai prinsip satu data Indonesia dari 215 data statistic sektoral yang dikelola.
- Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan target Tingkat II dan terealisasi Tingkat III s/d V atau senilai 918, yaitu bahwa dari 7 Tingkat kelengkapan penerapan standar ISO27001 sesuai kategori terdapat 7 kategori yang dinilai yaitu Tata Kelola dengan nilai 126,

Pengelolaan Resiko dengan nilai 72, Kerangka Kerja Keamanan Informasi dengan nilai 192, Pengelolaan Aset dengan nilai 258, dan Teknologi Keamanan Informasi dengan nilai 186, Perlindungan Data Pribadi dengan Nilai 84 dan Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga dengan Nilai 100 %.

- Tujuan 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target B, tetapi pada tahun 2023 tidak ada penilaian RB.
- Sasaran 5. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah dengan Indikator : 1. Nilai SAKIP Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2022 adalah ... (C) sedangkan untuk dokumen 2023 belum ada penilaian dari Inspektorat, 2. Laporan Keuangan sesuai SAP, 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Di Kecamatan Bontosikuyu untuk Tahun 2023 senilai 80,1 dari target 85,50. Realisasi melampaui target berdasarkan hasil survey terhadap 9 unsur pelayanan, yaitu kesesuaian persyaratan pelayanan dengan nilai konversi 85,0, Kemudahan prosedur/ alur pelayanan dengan nilai konversi 70,2, waktu pelayanan dengan nilai konversi 75,8, kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan dengan nilai konversi 95,3, kesesuaian jenis layanan dengan nilai konversi 75,8, kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan dengan nilai konversi 80,8, perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dengan nilai konversi 76,7, kualitas sarana dan prasarana dengan nilai konversi 75,8 dan penanganan pengaduan pengguna layanan dengan nilai konversi 85,8.
- Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2023 tercapai 100 % dari target 100 %. Target tercapai karena pada Tahun 2023 terdapat 23 layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dari 23 Layanan Publik yang dilaksanakan yaitu :
 - Layanan Administrasi Kependudukan merupakan Layanan Publik yang masih dilaksanakan secara offline oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar

- SMART BAPENDA merupakan Aplikasi Android yang bertujuan untuk mendukung pemutakhiran data Objek Pajak PBB dan BPHTB secara online dengan peran serta langsung oleh Wajib Pajak
 - TTE (Sistem Tanda Tangan Elektronik) yang diakses melalui alamat <http://tte.kepulauanselayarkab.go.id/>.
- Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023/24 adalah 37 Perangkat Daerah atau tercapai 100 % disebabkan karena semua OPD telah menggunakan data statistik dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kegiatan Tahun berikutnya.
 - Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2025 adalah 37 Perangkat Daerah atau tercapai 100 % karena semua OPD telah menggunakan data statistik dalam Menyusun Laporan Evaluasi seperti LAKIP dan LPPD.

2.1. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR CAMAT BONTOSIKUYU

Kecamatan Bomtosikuyu merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2026-2030 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan adalah :

“Bersama Membangun Selayar Maju dan Sejahtera”

Adapun rumusan pemaknaan visi tersebut adalah :

Bersama adalah *“Bentuk sinergitas diantara penta helix pemangku kepentingan (Akademisi, Swasta, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Media) yang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam satu kesatuan yang utuh, solid, dan menjunjung tinggi sifat **toleransi** untuk mengelola sumber daya alam, dalam rangka membangun **perekonomian daerah**”*, dengan **Prinsip Pembangunan :**

1. Meminimalkan kesenjangan ekonomi antara Selayar daratan dengan Selayar kepulauan.

2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan,
3. Pelayanan sosial yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan.
4. Tingkat kesejahteraan penduduk Pulau Selayar, sama dengan tingkat kesejahteraan penduduk kepulauan.
5. Infrastruktur dibangun sesuai kebutuhan pulaunya.
6. Ketersediaan pangan (bahan makanan) di Pulau Selayar, sama dengan yang ada di kepulauan.
7. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berkeadilan, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Membawa artinya “Pergerakan perilaku ekonomi sebagai daerah konsumen menjadi daerah produsen dengan peningkatan kualitas manajemen dan teknologi industri menuju masyarakat maju dan sejahtera”.

Maju artinya “Kemampuan daerah melakukan perubahan paradigma pembangunan dengan menerapkan **digitalisasi dan teknologi industri** pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian dengan **hilirisasi** sumber daya alam berbasis UMKM dan **huluisasi** pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal”, dengan agenda pembangunan di bawah ini.

“Agenda Pembangunan” :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berlandaskan keimanan dan ketakwaan (Imtak).
2. Pengembangan Perekonomian Daerah.
3. Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
4. Pengembangan Sosial, Budaya, dan Agama.
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Efektif.

Sejahtera artinya “Hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan **pengangguran** dan **kemiskinan**, serta memberi dampak pada meningkatnya **daya beli** masyarakat”, dengan **kondisi** yang diharapkan :

1. kesempatan berusaha terbuka;
2. lapangan kerja tersedia;
3. Angka pengangguran menurun;
4. Angka kemiskinan menurun;
5. Daya beli masyarakat meningkat;
6. Ketentraman dan kedamaian masyarakat yang penuh toleransi; dan

7. Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif

Pada Misi 1 ini, Kecamatan Bontosikuyu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih professional, bermutu dan akuntabel menuju tata Kelola yang baik melalui penyelenggaraan e-Government. Selain telaahan terhadap visi dan misi yang diuraikan di atas. Kecamatan Bontosikuyu juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerinthan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Misi 3 : Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah

Pada misi ini Kecamatan Bontosikuyu diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan perekonomian daerah dan Peningkatan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat .

Dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :

1. Pengembangan data Kepemududukan menjadi pusat data Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar dalam Portal Satu data Selayar.
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi kepada Masyarakat.
5. Pengembangan jaringan telekomunikasi data yang aman.

6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat, yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
8. Pengembangan sumberdaya aparatur Kecamatan Bontosikuyu yang menguasai teknologi informasi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BONTOSIKUYU

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bontosikuyu pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 sebanyak 5 program, dijabarkan dalam 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Anggaran Kegiatan Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp.1.823.857.000 (satu Milyar Delapan Ratus dua Puluh Tiga Juta Delapan ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

1)PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

- b. **Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan alokasi anggaran Rp. 12.980.000- dan terealisasi sebesar Rp 0. atau 0 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Program perencanaan , penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah sebagai berikut :
7. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 6.618.000,-- dan terealisasi sebesar Rp.0 atau 0 % dari alokasi anggaran
 8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 1.518.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0 atau 0 % dari alokasi anggaran
 9. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 1.562.000,- dan terealisasi sebesar Rp. atau 0% dari alokasi anggaran
 10. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Fokumen DPA dengam aloasi anggaran Rp. 1.616.600 dan terrealisai sebesar Rp.0 atau 0 % dari alokasi anggaran
 11. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Fokumen DPA dengam aloasi anggaran Rp. 1.616.600 dan terrealisai sebesar Rp.0 atau 0 % dari alokasi anggaran
 12. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Petrunahan DPA dengam aloasi anggaran Rp. 1.616.600 dan terrealisai sebesar Rp.0 atau 0 % dari alokasi anggaran

- c. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** bertujuan untuk pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan alokasi anggaran Rp 1.551.298.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 247.340.680.- atau 15.45 % dari alokasi anggaran dengan Sub Kegoatan

Adapun rincian kegiatan dan program :

1. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.551.298.000 dan terealisasi sebesar Rp..247.340.680.-. atau sebesar 15.45%
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 2.553.600 dan Realisasi sebesar Rp.0 atau 0 % dari lokasi Anggaran
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.273.300 dan Realisasi sebesar Rp, 0 atau 0 % dari Lokasi Anggaran

- D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** bertujuan untuk peningkatan penyediaan peraturan perundang undangan dengan alokasi anggaran Rp. 198.130.000- dan terealisasi sebesar Rp. 18.600.000- atau 13.13 % dari Alokasi anggaran

Adapun rincian kegiatan dari program :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan .dengan output terpenuhinya bahan bacaan dengan alokasi Anggaran Rp 8.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp. ,-atau 0 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Output kegiatan terlaksana konsultasi dan kelancaran tugas tugas SKPD dengan alokasi anggaran Rp 112.875,000- dan terealisasi sebesar Rp 18.600.000,- atau 5, 56 % dari alokasi anggaran.
3. Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan kantor / Belanja Modal dengan alokasi anggran Rp. 76.975.000 dan terrealisasi Rp.0 atau 0 % dari Lokasi Anggaran.

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

bertujuan untuk terlaksananya urusan pemerintahan di kecamatan bontosikuyu dengan alokasi anggaran Rp. 220.938.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.500.000 - atau 13 % % dari Alokasi anggaran.

Adapun rincian kegiatan dari Program:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan output terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi air dan listrik dengan alokasi anggaran Rp 18.140.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0 ,- atau 0 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor dengan output terpenuhinya pelaksanaan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp 202.798.150 dan terealisasi sebesar Rp36.500.000 - atau 13 % dari alokasi anggaran.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 107.608.00,- dan terealisasi sebesar Rp 12.650.000 ,- atau 99,17 % dari alokasi anggaran.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan dengan output kegiatan tersedianya biaya pemeliharaan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 97.608.888,- dan terealisasi sebesar Rp 12.650.000 atau 08 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 10,000,000 dan terrealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 % dari Lokasi anggran

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMETINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Kegiatan Koordiansi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0 % dari alokasi anggaran.

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Output terlaksananya kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0 % dari alokasi anggaran.

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.

A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.538.900 ,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000 atau 45 99 % dari alokasi anggaran.

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa alokasi anggaran sebesar Rp 12.000.000 ,-dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000 atau 100 % dari alokasi anggaran.
2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan alokasi anggaran sebesar Rp 2.538.000,-dan terealisasi sebesar Rp 0- atau 0 % dari alokasi anggaran.

4 . PROGRAM PENYELENGGRAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 81.568.000- dan terealisasi sebesar Rp 0- atau 0 % dari alokasi anggaran

Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp 81.568.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0 – atau 0 % dari alokasi anggaran.

5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERITAHAN DESA

. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan PemErintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.754.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0 atau 0 % dari alokasi anggaran.

3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.754.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0 - atau 0 % dari alokasi anggaran.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KECAMATAN BONTOSIKUYU																2.240.000.000			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.094.764.100	2.094.764.100	2.094.764.100									2.300.000.000	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen / Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu				100 %	100 %	12.980.000	12.980.000	12.980.000	0			-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif				13.000.000	Kantor Camat Bontosikuyu
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.618.000	6.618.000	6.618.000		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif				7.000.000	Kantor Camat Bontosikuyu
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.618.600	1.618.600	1.618.600		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif				2.000.000	Kantor Camat Bontosikuyu
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Kantor Camat Bontosikuyu				1 Dokumen	1 Dokumen	1.562.100	1.562.100	1.562.100		Kab. KepSemua Desa sekecamatan Bontosikuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif				2.000.000	Kantor Camat Bontosikuyu
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.618.600	1.618.600	1.618.600		Semua Desa sekecamatan Bontosikuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif				1.700.000	Kantor Camat Bontosikuyu
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.562.100	1.562.100	1.562.100		Semua Desa sekecamatan Bontosikuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif				1.700.000	Kantor Camat Bontosikuyu
	2.16.01.2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen / Laporan Pengelolaan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu				100 %	100 %	1.555.129.900	1.555.129.900	1.555.129.900				-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif				1.600.000.000	Kantor Camat Bontosikuyu
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

			Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 orang O rang/bulan	14 orang O rang/bulan	1.410.511.000	1.410.511.000	1.410.511.000		Semua Desa sekecamatan Bontosisukuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif			1.600.000.000	Kantor Camat Bontosisukuyu
2.16.01.2.02.0003			Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Laporan Dokumen	1000 Laporan Dokumen	2.553.600	2.553.600	2.553.600		Semua Desa sekecamatan Bontosisukuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif			3.000.000	Kantor Camat Bontosisukuyu
2.16.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan aBulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.278.3000	1.278.3000	1.278.3000		Semua Desa sekecamatan Bontosisukuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif			2.000.000	Kantor Camat Bontosisukuyu
2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor				100 %	100 %	198.130.000	198.130.000	198.130.000				-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif			250.000.000	Kantor Camat Bontosisukuyu
2.16.01.2.06.0005		Penyediaan Peralatam dan Perlengkapan Kantor / Belanja Modal																		
			Jumlah Paket Barang yang di realisasikan				1 Paket	1 Paket	76.975.000	76.975.000	76.975.000		Semua Desa sekecamatan Bontosisukuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif			80.000.000	Kantor Camat Bontosisukuyu
2.16.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				420 Eksemplar Dokumen	420 Eksemplar Dokumen	8.280.000	8.280.000	8.280.000	0	Semua Desa sekecamatan Bontosisukuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif			9.000.000	Kantor Camat Bontosisukuyu
2.16.01.2.06.0008		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjung				1 Laporan	1 Laporan	66.337.500	66.337.500	66.337.500		Semua Desa sekecamatan Bontosisukuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif			113.000.000	Kantor Camat Bontosisukuyu
2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	220.938.200	220.938.200	220.938.200				-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif			221.000.000	Kantor Camat Bontosisukuyu
2.16.01.2.08.0001		Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	18.140.050	18.140.050	11.420.050	-6.720.000	Semua Desa sekecamatan Bontosisukuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif			19.000.000	Kantor Camat Bontosisukuyu
2.16.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	177.798.150	177.798.150	187.798.150	(16.720.000)	Semua Desa sekecamatan Bontosisukuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif			203.000.000	Kantor Camat Bontosisukuyu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa				100%	100%	14.538.900	5.450.400	5.450.400				-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	Perangkat Daerah dan Masyarakat		15.000.000	Kantor Camat Bontosikuyu
	2.16.03.2.01.002	Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Sekecamatan Bontosikuyu				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000		Semua Desa sekecamatan Bontosikuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif			13.000.000	Kantor Camat Bontosikuyu
	2.16.03.2.01.003	Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	2.538.900	2.538.900	2.538.900		Semua Desa sekecamatan Bontosikuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif			3.000.000	Kantor Camat Bontosikuyu
	2.16.03.2.02	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase dan capaian kesejahteraan keluarga				100%	100%	20.000.000	20.000.000	20.000.000				-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	Perangkat Daerah dan Masyarakat		25.000.000	Kantor Camat Bontosikuyu
	2.16.03.2.02.001	Pembentukan dan penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil peningkatan Karakter masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000		Semua Desa sekecamatan Bontosikuyu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif			21.000.000	Kantor Camat Bontosikuyu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL
							SEBELUM	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH N UMUM	Persentase Perangkat Daerah yang dalam penyelenggaraan jrusa pemerintahan				100 %	100 %	33.800.000	33.800.000	33.800.000				
	2.20.02.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan</i>				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	33.800.000	33.800.000	33.800.000				-
	2.20.02.2.0 1.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasionak dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	33.800.000	33.800.000	33.800.000		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-
1.	2.21.02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Area Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang Dievaluasi				100 %	100 %	19.754.600	19.754.600	19.754.600				
	2.21.02.2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Pembinaan pengawasan pemerintah Desa</i>				100 %	100 %	19.754.600	19.754.600	19.754.600				-
	2.21.02.2.0 1.0001	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa													

			<i>Jumlah Data pengelolaan keuangan Desa dan Ase Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	19.754.600	19.754.600	19.754.600		Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-
J U M L A H									1.972.573.500	1.972.573.500	1.955.853.500	(16.720.000)			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai bulan Juni 2025 Triwulan I (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwal Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bontosikuyu tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar **Rp. 327.090.680-** atau **14.26 %** dari anggaran semula murni **Rp.2.236.098.000,-** menjadi anggaran perubahan **Rp. 1.955.853.500,-** perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2025.

Pariangan, April 2025
CAMAT BONTOSIKUYU,

Drs. MUHAMMAD ARIS
Pangkat : Pembina TK.I.IV/b
NIP. 1967101291995121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II : EVALUASI RENJA KEC. BONTOSIKUYU SAMPAI TRIWULAN I ..	9
2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC. BONTOSIKUYU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KEC. BONTOSIKUYU	25
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BOTOSIKUYU	34
BAB IV : RENCANA KERJA KECAMATAN BONTOSIKUYU	38
BAB V : PENUTUP.....	54